

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Infrastruktur merupakan elemen penting dalam kemajuan suatu negara. Pembangunan itu sendiri tidak terlepas dari campur tangan pemerintah dan masyarakat. Salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam pembangunan nasional adalah kemampuan pemerintahan yang transparan dan keterbukaan informasi publik yang baik untuk masyarakat dalam mewujudkan transparansi informasi public. Oleh karena itu perlu diketahui gambaran dan batasan transparansi informasi publik yang memadai.

Keterbukaan Informasi publik dalam Sistem *e-procurement* atau pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui internet (*e-procurement*) di Indonesia pada perspektif pemerintah dipercaya sebagai alat atau instrument untuk mewujudkan *good governance* dan pelayanan publik karena akan meningkatkan efisiensi biaya, efektifitas, waktu siklus yang lebih cepat, meningkatkan transparansi paket yang dilelang, menyediakan publik monitoring yang lebih baik. Layanan pengadaan secara elektronik yang telah diadakan oleh pemerintah yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam bentuk *website* dimana berisi informasi yang bersifat terbatas untuk para pelaku penyelenggara konstruksi mengenai pengadaan barang dan jasa serta informasi tender.

*Construction Sector Transparency Initiative* (CoST) lembaga internasional yang bergerak dibidang meningkatkan transparansi pada sektor infrastruktur publik menetapkan 51 indikator standar data transparansi infrastruktur publik yang dibagi dalam 2 fase yaitu fase kontrak dan fase proyek. Jika Indikator tersebut dapat di implementasikan dengan baik akan memberikan dampak positif pada sistem keterbukaan informasi publik pada penyelenggaraan konstruksi dan perkembangan negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Transparansi Konsultasi Konstruksi pada Penyelenggaraan Proyek Pemerintah di Jawa Barat”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Peraturan dasar hukum dan perundang-undangan yang digunakan terkait penyelenggara jasa konstruksi dan keterbukaan informasi publik.
2. Transparansi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai penyelenggara jasa konstruksi dan keterbukaan informasi pada Konsultan perencana dan pengawas
3. Penerapan Indikator lembaga *Construction Sector Transparency Initiative* (CoST) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi
4. Gambaran informasi transparansi penyelenggaraan konstruksi secara terbuka pada Perencanaan dan pengawasan konstruksi di Jawa Barat.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Peraturan dan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang terkait transparansi penyelenggara konstruksi dan keterbukaan informasi public.
2. Indikator yang digunakan yaitu berdasarkan *Construction sector Transparency Initiative* (CoST)
3. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menyebarkan kuisioner dan wawancara mendalam pada PPID pihak perencana dan pengawas konstruksi di Jawa Barat.

Berdasarkan pada batasan masalah pada penelitian ini, maka dapat diangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa factor yang paling berpengaruh dalam transparansi konsultan di kota Bandung?
2. Bagaimana indikator *Construction Sector Transparency Initiative* (CoST) digunakan di Indonesia ?
3. Bagaimana gambaran transparansi penyelenggaraan konstruksi sektor pemerintah menurut Konsultan konstruksi dikota Bandung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui factor yang paling mempengaruhi penyelenggaraan konstruksi di bidang konsultan di kota Bandung.
2. Mengetahui gambaran transparansi penyelenggaraan konstruksi sektor pemerintah menurut indikator Intenasional yang ditentukan oleh *Construction Sector Transparency Initiative (CoST)*.
3. Mengetahui Gambaran Transparansi Penyelenggaraan Konstruksi dan keterbukaan informasi public menurut Konsultan Perencana dan pengawas dengan teknik analisis *Principal Components Analysis (PCA)*

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan dengan penelitan ini dapat memberikan dampak dan manfaat sebagai berikut :

1. Dapat dijadikan pedoman dan acuan untuk transparansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
2. Memberikan dampak yang signifikan bagi ilmu manajemen konstruksi .
3. Dapat menjadi referensi dan informasi sebagai bahan penelitian yang lebih lanjut.
4. Acuan dan Gambaran transparansi penyelenggaraan konstruksi dan keterbukaan informasi public dalam konsultan perencana dan pengawas.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penyusunan Tugas Akhir ini memiliki beberapa bagian di dalamnya terdiri dari :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Berisi tentang teori-teori dasar yang dipakai sebagai acuan dan landasan yang berhubungan dengan penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Berisikan metodologi yang akan menjadi alur dalam analisis yang akan dilakukan serta menguraikan peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam penelitian.

### **BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil temuan penelitian dan pembahasan dari Analisa data yang telah dilakukan serta diperoleh kesimpulan hasil penelitian

### **BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

Bab ini berisikan simpulan yang didapat dari hasil penelitian serta memberikan implikasi atau rekomendasi untuk perbaikan dalam suatu perencanaan dikemudian hari.